

DINAMIKA RIVALITAS CHINA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGGAPI KEAMANAN SELAT TAIWAN

Prayudy Yusga Sudarno¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The dynamics that occur in the Asian region are a concern for countries in the world. Especially in the Taiwan Strait, which is the link between Southeast Asia, East Asia, and the Pacific. This strait is strategic because of this and has historical importance for China and Taiwan. The presence of the United States in this region gives a signal to China not to take actions that can disrupt regional stability. However, the presence of the United States and its allies is not liked because it is considered as an intervention by the United States against China. This study aims to examine the Rivalry of China and the United States against Taiwan Strait Security. This rivalry can cause the stability of the area to be disturbed. The researcher uses the theory of national interest to see how steps are taken by countries that are involved in interests. The results of this study conclude that the conflict between China-Taiwan is caused by fundamental differences in views regarding the status of Taiwan so that the two fail to find common ground between the two. Rivalry in the Taiwan Strait will continue to increase if the United States and China prioritize strength over diplomacy.

Keywords: Dynamics of Rivalries US and China, Security, Taiwan Straits.

ABSTRAK

Dinamika yang terjadi di kawasan Asia menjadi perhatian bagi negara – negara di dunia. Khususnya di Selat Taiwan yang menjadi penghubung antara Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik. Selat ini menjadi strategis karena hal tersebut dan memiliki nilai historis yang penting bagi China dan Taiwan. Kehadiran Amerika Serikat di Kawasan ini memberikan sinyal pada China untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Namun, justru hadirnya Amerika Serikat dan sekutunya tidak disukai karena dianggap sebagai intervensi Amerika Serikat terhadap China. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah Rivalitas China dan Amerika Serikat terhadap Keamanan Selat Taiwan. Rivalitas ini dapat menyebabkan kestabilan kawasan tersebut terganggu. Peneliti menggunakan teori kepentingan nasional untuk melihat bagaimana langkah yang diambil oleh negara yang terlibat kepentingan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik antara China-Taiwan disebabkan adanya perbedaan pandangan mendasar mengenai status Taiwan sehingga antara keduanya gagal menemukan titik temu di antara keduanya. Rivalitas di Selat Taiwan akan terus meningkat apabila Amerika Serikat dan China mengutamakan kekuatan dibandingkan diplomasi.

Kata Kunci: Dinamika Rivalitas AS dan China, Keamanan, Selat Taiwan.

PENDAHULUAN

Saat tahun 1949 dan berakhirnya perang saudara China. Kelompok Nasionalis yang kalah, juga dikenal sebagai Kuomintang, mundur ke Taiwan dan menjadikannya pusat pemerintahan mereka. Sementara Komunis yang menang mulai memerintah daratan sebagai Republik Rakyat China. Kedua belah pihak mengatakan mereka mewakili seluruh China. Jika dibandingkan dengan China, Taiwan merupakan negara yang lemah. Tetapi, Taiwan mendapatkan dukungan militer dari Amerika Serikat sehingga Taiwan dapat memiliki kekuatan yang lebih baik.

Masalah antara China dan Taiwan bukanlah masalah antara dua negara saja, sejak perang sipil yang terjadi antara pihak nasionalis dan komunis di China pada tahun 1940an, Amerika Serikat ikut terlibat dalam masalah Taiwan. Perang Korea yang terjadi di tahun 1950-1954 menjadi alasan Amerika Serikat untuk terlibat dalam intervensi masalah Taiwan. Sampai saat ini Amerika Serikat selalu berupaya untuk melindungi Taiwan dari pengaruh kekuatan China.

Sebagai kekuatan besar di Asia, Kebangkitan China dapat terhambat dengan adanya masalah dengan Taiwan. Saat perang dunia ke-2 berlangsung, Taiwan dijadikan Jepang sebagai basis untuk Jepang dalam melakukan serangan ke China. Sedangkan saat terjadi Perang Dingin. Amerika Serikat menjadikan Taiwan sebagai alat untuk menghalau pengaruh besar komunis China di Asia. Karena itu, China tidak ingin Taiwan merdeka atau jatuh ke dalam orbit kekuasaan negara lain karena jika hal itu terjadi, dampaknya akan sangat fatal bagi perkembangan ekonomi dan keamanan nasional China.

Secara tradisional, masalah keamanan adalah cara berkompetisi antar negara untuk keamanan. Pencarian dan kompetisi itu diwujudkan misalnya melalui konfrontasi dan perang. Oleh karena itu keamanan merupakan masalah antar negara atau intrastate problem (Timothy D Hoyth 2013). Amerika Serikat merasa perlu untuk menjaga stabilitas wilayah Asia Pasifik dan Taiwan khususnya (Syahbudin, 2019). Konflik penyeberangan di selat Taiwan antara China-Taiwan terjadi pertama kali pada tahun 1954-1955, krisis penyeberangan Selat Taiwan kedua terjadi pada tahun 1958 (Bullard, 2004: 155). Krisis selat Taiwan juga terjadi pada tahun tahun 1962. Pada krisis pertama RRC menyerang Republik China yang pada saat itu berada di Kepulauan Yijiangshan, dan memaksa Republik China untuk meninggalkan Kepulauan Tachen, yang pada akhirnya RRC berhasil menguasai wilayah tersebut. Amerika Serikat, yang memang tak menyukai rezim komunis China bersekutu dengan Uni Soviet (Rusia) yang menjadi musuh AS saat perang dingin, melihat begitu besarnya pengaruh China akhirnya memutuskan untuk bersekutu dengan Republik China dan membantu mengevakuasi personel militer Republik China dari Tachen ke Formosa (Taiwan). Meski berakhir dengan gencatan senjata, krisis ini akhirnya berlanjut ke krisis selanjutnya di selat yang sama. Pasca terjadinya krisis ini AS membuat suatu perjanjian dengan pihak Chiang Kai-Shek (Taiwan) yaitu Mutual Defence Treaty (MDT). Berdasarkan perjanjian di atas, Amerika Serikat bertanggung jawab atas keamanan maupun pertahanan Taiwan. Selat Taiwan merupakan wilayah perairan yang berbatasan langsung antara China dan Taiwan. Luas wilayah Selat Taiwan adalah 55.000 KM². Selat Taiwan adalah jalur strategis bagi transportasi dan perdagangan yang menghubungkan antara Laut China Timur dan Laut China Selatan.

China menjadi ancaman bagi negara – negara barat khususnya Amerika Serikat. Kekuatan dari sektor ekonomi dan militer, menjadi dorongan utama bagi China untuk menjadi negara adidaya yang dapat menyaingi kekuatan Amerika Serikat. Sebagai negara yang kuat,

negara – negara di barat mulai berusaha untuk menahan pengaruh dan kekuatan China khususnya di kawasan Asia. Amerika Serikat berusaha menarik simpati dari dukungan negara barat dan kawasan Asia untuk membendung China karena semakin besar China maka semakin besar ancaman utama Amerika Serikat. Adanya pangkalan militer dan kapal induk Amerika Serikat di sekitar laut Pasifik membuktikan bahwa Amerika Serikat sangat mengawasi China dalam perkembangannya. Selain itu, Amerika Serikat membangun kerjasama dalam bidang militer dengan Taiwan sebagai bentuk dukungan terhadap negara demokrasi tersebut. Kepentingan Amerika Serikat di Taiwan adalah untuk menyimpan posisi strategis sebagai upaya dalam membendung kekuatan hegemoni China di kawasan Asia. Menanggapi kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Taiwan, China semakin menekan Taiwan dengan melakukan sanksi dan tekanan terhadap Amerika Serikat bahwa mereka harus mengikuti One China Policy.

Amerika Serikat khawatir dengan pertumbuhan China yang sangat pesat. Amerika Serikat khawatir China akan menjadi lepas kendali karena tidak terkontrol oleh hukum internasional yang sudah ada. Kekhawatiran ini mendorong Amerika Serikat untuk terus melakukan penekanan terhadap China agar tidak bergerak agresif dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Pada 26 Juni 2021. Sebanyak 28 pesawat militer China (PLA), termasuk jet tempur dan bomber dalam misi itu tercatat 14 jet tempur J-16 dan J-11 China melintas. empat bomber H-6, yang dapat membawa senjata nuklir. nuklir memasuki zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ). Peristiwa ini terjadi selang sehari setelah pemimpin kelompok tujuh (G7) mengeluarkan pernyataan bersama mengecam China atas serangkaian masalah, termasuk selat Taiwan. Negeri Xi Jinping kemudian membalasnya dengan menyebut Amerika Serikat (AS) dan kelompok itu membuat tuduhan. AS, yang membela Taiwan mengatakan akan memastikan Taipe bisa mempertahankan diri. AS tak memiliki hubungan diplomatic formal dengan Taiwan namun menjadi pendukung utama pulau itu. Kejadian masuknya 28 pesawat militer China ke Selat Taiwan ini merupakan peristiwa yang menambah ketegangan antara China dengan Amerika Serikat khususnya di kawasan tersebut.

Apabila dilihat dari segi historis, hubungan antara China dan Taiwan berlangsung kurang baik dengan keinginan China untuk memaksa melakukan reunifikasi terhadap Taiwan. Kawasan selat Taiwan yang merupakan jalur strategis bagi perdagangan dan transportasi menjadi kawasan panas karena selat Taiwan merupakan batas antara China dan Taiwan. Hal ini di perparah dengan adanya rivalitas antara China dan Amerika Serikat. Taiwan yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat membuat China khawatir Taiwan akan jatuh kedalam pengaruh Amerika Serikat sehingga dapat mengganggu kedaulatan negaranya. Selat Taiwan merupakan wilayah penting karena Selat Taiwan merupakan penghubung antara Asia Tenggara dan Asia Timur.

Oleh karena itu, Melihat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun Tesis yang berjudul: **“DINAMIKA RIVALITAS CHINA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGGAPI KEAMANAN SELAT TAIWAN”**

KERANGKA ANALITIK

Realisme muncul setelah terjadi perang dunia ke-2, dengan asumsi dasar realisme diantaranya adalah (1) pandangan pesimis atas sifat manusia; (2) keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang; (3) menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan

kelangsungan hidup negara; (4) skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan politik domestic (Jackson dan Sorensen .1999). realisme memandang bahwa sistem dunia bersifat anarki yang artinya dalam dunia internasional, tidak ada pemimpin dunia. negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan tidak ada kekuasaan tertinggi diatas negara.

Realisme memandang bahwa suatu negara dapat mencapai rasa aman apabila mereka memiliki power yang cukup. Maka negara akan berusaha untuk berkompetisi dengan negara lain dalam hal power dengan tujuan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara mereka, konsep ini disebut sebagai self – help. Power yang dimiliki negara akan menunjukkan tingkat keamanan suatu negara. Semakin baik kekuatan negara maka semakin aman negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu yang dikaji. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam menyajikan data secara deskriptif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih rinci dan dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara terfokus (*focused interview*), di mana peneliti berinteraksi secara langsung dan melakukan pertemuan tatap muka dengan informan untuk memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Pandangan Tiongkok Atas Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Proses Penyatuan Tiongkok Dan Taiwan.

PEMBAHASAN

A. Isu Taiwan

Secara historis, hubungan Taiwan ke daratan China berawal dari penemuan wilayah pertama pada tahun 230 selama periode Tiga Kerajaan. Setelah Dinasti Sui dan Tang mengkonsolidasikan kontrol China atas daerah yang awalnya bernama Pulau Yizhou, selama Dinasti Song (960-1279) dan Dinasti Yuan (1271-1368), imigran etnis Han sebagian besar berasal dari Provinsi Fujian ke Taiwan (Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara China 1998). Selama Dinasti Song, China aktif menjalin hubungan dagang dengan Jepang dan negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Namun, situasi berbalik ketika Dinasti Ming ke-4 berkuasa). Pemerintah Ming menarik pejabat dan mengevakuasi imigran China dari Taiwan. Pada saat bersamaan, imperialisme Eropa sedang menyebar ke Asia.

Ketika China Daratan mengalami pergantian kekuasaan dari Dinasti Ming ke Dinasti Qing (1644-1911), Taiwan telah diduduki oleh Belanda melalui kongsi dagangnya, Dutch East India Company (1624-1662). Belanda memanfaatkan Taiwan sebagai basis pasarnya untuk mempertemukan para pedagang dari negara kolonial ini dengan China dan Jepang. Merasa dieksploitasi oleh Belanda, penguasa Dinasti Ming menyerbu Taiwan dan merebut wilayah ini pada 1662. Di kala Taiwan kian menunjukkan perkembangan berarti, penguasa Qing semakin memberikan perhatiannya pada pulau ini. Namun, upaya itu kerap terganggu oleh intervensi kekuatan asing dari Eropa yang ingin menguasai China khususnya, dan Asia pada umumnya. Perang Candu (1856-1860) yang dilancarkan Inggris dan Perancis semakin melemahkan kekuasaan Dinasti Qing. Walaupun kedua negara Eropa itu pernah mendaratkan pasukannya ke Pulau Taiwan, tetapi militer China berhasil mengusirnya. Namun, tidak demikian halnya

dengan Jepang yang berhasil merebut Taiwan melalui Perjanjian Shimonoseki (1895). Hingga 1945, Taiwan digunakan Jepang sebagai basis militer untuk mengirimkan pasukan ke Asia Tenggara. Selain itu, Jepang secara massif dan represif menceraabut akar budaya masyarakat Taiwan dengan melancarkan program Jepangisasi.

Gabe Wang (2006, 9-12) merinci adanya enam factor Kontributif yang memicu semakin kompleksnya isu Taiwan. Pertama, permasalahan Taiwan muncul karena ekspansi imperialis modern oleh kekuatan-kekuatan asing sebelum Perang Dunia II yang memaksa China terus menjadi bangsa pecundang. Sejarah modern China yang berawal pada era Dinasti Qing adalah sejarah penaklukan negara besar ini oleh kekuatan-kekuatan besar Eropa dan Asia. Kekalahan memalukan dalam perang melawan Jepang yang berakibat pada lepasnya Taiwan telah membuat China frustrasi. Karena itu, kembalinya Taiwan ke tangan China (1945) dan keberhasilan Revolusi Komunis (1949) dipandang telah mengembalikan harga diri China sebagai bangsa besar.

Kedua, isu Taiwan menjadi hambatan besar kebangkitan China. Pada masa Perang Dunia II, Jepang menjadikan Taiwan sebagai basis untuk melancarkan serangan ke wilayah tenggara China. Pada era Perang Dingin, AS memanfaatkan Taiwan sebagai instrumen penangkal penyebaran paham komunis dari China. Karena itu, China tidak ingin Taiwan merdeka atau jatuh ke dalam orbit kekuasaan negara lain karena jika hal itu terjadi, dampaknya akan sangat fatal bagi perkembangan ekonomi dan keamanan nasional China.

Ketiga, keunikan sejarah Taiwan menjadikannya berbeda dengan China. Meskipun Taiwan lebih lama dikuasai oleh China dan 98 persen populasi Taiwan merupakan etnis Han yang berasal dari China Daratan, tetapi kompetisi internasional untuk memperebutkan wilayah Taiwan telah berkontribusi besar pada semakin menjauhnya Taiwan dari China. Terlebih, di kala pemerintahan Nasionalis China mencampakkan Taiwan semasa terjajah, pemerintahan kolonial Jepang (1895-1945) sukses menceraabut akar budaya China dari rakyat Taiwan.

Keempat, keterpisahan yang panjang telah menjadikan China dan Taiwan menempuh jalur berbeda dalam pengelolaan negara. Ketika China menerapkan sistem sosialis antara 1950-an dan 1970-an, Taiwan memilih jalan kapitalis. Berbeda dengan Taiwan yang lebih demokratis sehingga kerap kali terjadi perubahan penguasa, sulit membayangkan kekuasaan Partai Komunis akan jatuh di China.

Kelima, isu Taiwan bukanlah persoalan Taiwan semata, namun selalu melibatkan China dan AS yang memiliki kepentingan berbeda. Sejak perang sipil terjadi antara kubu Nasionalis dan Komunis di China pada 1940-an, AS telah melibatkan diri dalam isu Taiwan. Perang Korea yang terjadi pada 1950-1953 semakin mendorong AS untuk melancarkan ntervensi dalam kasus Taiwan. Hingga kini, intervensi itu terus dilakukan dengan melindungi Taiwan dari ancaman China. Hal inilah yang menjadikan Taiwan dan China sulit bersatu.

Keenam, perkembangan hubungan politik antara Taiwan dan China sangat dinamis. Dari awal 1950-an hingga akhir 1970-an, hubungan antara kedua belah pihak sering tegang. Kemudian situasi berubah menjadi lebih baik dalam dua dekade. Namun, ketegangan kembali berkobar pada pertengahan 1990-an, ketika gerakan kemerdekaan Taiwan semakin kuat. Situasi semakin memburuk setelah DPP pro-kemerdekaan mengambil alih kekuasaan dari Kuomintang pada tahun 2000. Namun, hal itu tidak berlangsung lama setelah Kuomintang berkuasa pada 2008 hingga sekarang.

B. Isu Taiwan Dalam Hubungan China dan Amerika Serikat

Dalam kontestasi geopolitik di Asia Timur, dinamika hubungan China dan Amerika Serikat seringkali ditentukan oleh perkembangan isu Taiwan dan penyikapannya kedua negara besar ini terhadap isu itu. Berbeda dengan negara-negara lain di panggung internasional, Taiwan bukanlah entitas politik yang berdaulat. Dalam forum-forum global, Taiwan diposisikan sebagai entitas ekonomi nonnegara. Karena itu, meskipun perkembangan ekonominya maju, Taiwan tidak memiliki kekuatan politik setara dengan negara-negara lain. Tidak mengherankan jika gerak Taiwan di lingkungan global sangat ditentukan oleh relasinya dengan kekuatan-kekuatan besar dunia seperti China dan AS, dua negara yang paling berkepentingan di Selat Taiwan.

Secara historis, dibandingkan AS, China memiliki pengalaman masa lalu yang jauh lebih panjang dengan Taiwan. Hal ini wajar karena lokasi geografis China (Daratan) dan Taiwan berdekatan, hanya dipisahkan oleh Selat Taiwan. Tetapi, kedekatan historis dan geografis rupanya tidak berbanding lurus dengan kedekatan politik dan ekonomi. Berbeda dengan China yang komunis, Taiwan memilih sejalan dengan AS yang demokratis. Sejak semula pun, Taiwan menerapkan sistem ekonomi serupa dengan AS. Situasi inilah yang menjadikan Taiwan seolah terhimpit dalam dua kekuatan global yang bertolak belakang. Celakanya, dua kekuatan global itu merupakan negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis dengan Taiwan. Demi kepentingan berbeda, China dan AS saling memperebutkan pengaruh di Taiwan.

Bagi China, Taiwan adalah pulau yang hilang. Sepanjang berbagai perang di masa lalu, Taiwan telah berulang kali mengalami integrasi dan runtuhnya dengan China. Pemimpin China percaya bahwa penyatuan Taiwan dan China akan membuat negara itu lebih besar dan lebih kuat. Oleh karena itu, integrasi Taiwan dan China adalah mimpi besar yang akan terus diwujudkan oleh presiden China, termasuk Hu Jintao dan Xi Jinping. Pada peringatan tahun Revolusi Nasionalis, yang menggulingkan monarki di Beijing pada 10 Oktober 2011, Presiden Hu berkata: “Bersama untuk mencapai peremajaan besar di negara di China. Mencapai persatuan melalui cara damai sangat membantu kepentingan dasar semua orang China, termasuk rekan senegarannya Taiwan.”

Di sisi lain, intervensi AS seringkali menghambat upaya China untuk menyatukan Taiwan di wilayahnya. Di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan (TRA), yang telah berlaku sejak 1979, Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung dan melindungi Taiwan. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak pernah berhenti mengarahkan bantuan keuangan dan militer ke Taiwan. Tercatat selama 30 tahun (1980-2010) setelah pengenalan TRA, Amerika Serikat menjual senjata senilai \$25,39 miliar ke. Untuk memperingati 35 tahun TRA pada tanggal 9 April 2014, 52 Senator AS mengirim surat kepada Presiden Barack Obama mendesak Presiden Barack Obama untuk meningkatkan bantuan ke Taiwan. Amerika Serikat dan berada dalam semangat TRA” (FocusTaiwan2014)

Fakta ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara China dan Amerika Serikat. Kepentingan yang bersaing ini telah membuat Taiwan menjadi medan pertempuran dua raksasa dunia, membuat pembahasan masalah ini menjadi lebih rumit. Isu Taiwan tidak bisa dipisahkan dari China, karena secara historis Taiwan adalah bagian dari China. Kedua, intervensi AS sejak 1950-an telah menempatkan negara tersebut dalam dinamika kawasan Selat Taiwan, sehingga stabilitas politik di Asia Timur bergantung pada beberapa dimensi kebijakan terhadap Amerika Serikat di kawasan tersebut.

C. Kehadiran Amerika Serikat dalam Isu Taiwan

China dan AS memahami isu Taiwan dalam perspektif berlainan. Sejak semula, China selalu memandang Taiwan sebagai bagian integral teritorinya yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah daratan. Namun, pengalaman historis Taiwan yang berbeda dengan China Daratan menjadikan Taiwan tidak dapat dikelola serupa wilayah daratan sehingga pemerintah China menerapkan kebijakan one country two system. Sementara itu, AS tidak pernah menganggap Taiwan sebagai bagian dari China. Bagi AS, Taiwan bukanlah China; Taiwan adalah Taiwan, yang sistem ekonomi politik dan sosiokulturalnya tidak bisa disamakan dengan China. Pandangan semacam itu telah terbentuk dalam pola pikir para pengambil kebijakan AS sejak Perang Dunia II. Karena itu, segala bentuk gangguan China terhadap Taiwan harus dibendung oleh AS. Strategisnya kepentingan AS di Asia Timur juga kian membulatkan kebijakan untuk melindungi Taiwan. Perbedaan pandangan itulah yang membuat hubungan China-AS kerap kali diwarnai ketegangan. Namun, kedua negara terus menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka dengan menahan diri untuk tidak meningkatkan eskalasi menjadi konflik terbuka.

Sejarah hubungan Tiongkok-Amerika dalam masalah Taiwan dimulai dengan dukungan AS kepada pemerintah Kuomintang dalam menghadapi agresi Jepang terhadap Tiongkok daratan pada awal 1940-an. Perang antara nasionalis dan komunis. Meskipun AS tahu betapa korupnya pemerintahan nasionalis yang tidak didukung oleh mayoritas orang China, karena alasan ideologis, AS tetap mendukungnya untuk mencegah penyebaran sistem ideologi komunis (Xiao 2001). Maka, ketika Revolusi Komunis berhasil menggulingkan pemerintahan Kuomintang dan mendirikan Republik Rakyat China (RRC) pada tahun 1949, Amerika Serikat memutuskan untuk mendukung Pemerintah Nasionalis. Partai baru yang didirikan oleh Kuomintang di Taiwan. Tujuan dukungan ini jelas, untuk mencegah revolusi komunis menyebar ke seluruh dunia. Taiwan digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan ini dengan aliran bantuan luar negeri senilai jutaan dolar AS.

Isu Taiwan tetap menjadi ganjalan hubungan China-AS. Apalagi, manakala pemerintah AS menormalisasi hubungan dengan China pada 1979, Kongres AS mengimbanginya dengan mengesahkan Taiwan Relations Act (TRA) pada 10 April tahun yang sama. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa “Washington would maintain the capacity of the United States to resist any resort to force or other forms of coercion that would jeopardize the security, or the social or economic system, of the people on Taiwan” (TRA 1979). Kebijakan inilah yang menjadikan isu Taiwan semakin rumit dan kompleks karena di satu sisi AS mengakui one-China policy sesuai Shanghai Communique, tetapi di sisi lain AS berkewajiban melindungi Taiwan berdasarkan amanat TRA (Yang 2004, 10). Menyikapi pengesahan TRA, China menyampaikan keberatannya dan mempertanyakan komitmen AS. Meski marah, namun Beijing tetap menjaga diri untuk tidak memperkeruh situasi berubah menjadi konflik terbuka (Tucker 2009, 122).

Taiwan Relations Acts (TRA) merupakan suatu perjanjian yang paling menentukan bagi hubungan AS dan Taiwan. TRA ini disusun berdasarkan hukum domestik dan sebagai penjelasan atas kepentingan AS di Taiwan. TRA ini termasuk melanjutkan perdagangan senjata ke Taiwan juga mewujudkan komitmen AS untuk menjaga perdamaian kawasan Asia Pasifik, untuk itulah AS dan Taiwan tetap mempertahankan aliansi pertahanan mereka. Namun AS nampaknya memiliki standar ganda yang dibuktikan pada 19 April 1979, AS membuat perjanjian baru dengan Taiwan yakni Taiwan Relations Act (TRA) yang ditandatangani oleh presiden Jimmy Carter yang kemudian menjadi landasan aliansi Taiwan-AS hingga saat ini.

Meskipun demikian, niat baik China untuk mengembangkan pola baru relasi yang lebih istimewa tidak menyurutkan langkah AS untuk terus mempersenjatai Taiwan. Pada Januari 2010, AS menjual paket persenjataan senilai 6,4 miliar USD kepada Taiwan. Paket itu termasuk 60 helikopter Black hawk, 114 rudal Patriot, sepasang kapal pemburu, dan sistem komunikasi persenjataan canggih. AS menegaskan bahwa transfer persenjataan itu merupakan wujud jelas dari komitmen pemerintahan Obama untuk melaksanakan perjanjian TRA dengan menyediakan senjata pertahanan diri yang dibutuhkan oleh Taiwan. Menyikapi hal itu, China mengekspresikan kemarahannya. Wakil Menteri Luar Negeri He Yefei menuding penjualan senjata itu sebagai “rude interference in China's internal affairs, severely endangering China's national security.” Sebaliknya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, P.J. Crowley, mengatakan: “We think this action is consistent with the U.S. one-China policy ... and contributes to maintaining stability and security across the Taiwan Strait” (CNN 2010).

Pada September 2011, AS dan Taiwan menyepakati paket modernisasi pesawat F-16 sebesar 5,9 miliar USD. Bagi AS, penjualan senjata itu akan meningkatkan “survivability, reliability and combat capability” tentara Taiwan. AS percaya tindakan itu akan berkontribusi bagi stabilitas Selat Taiwan (Financial Times 2011). Walaupun demikian, Wakil Perdana Menteri China, Zhang Zhijun, memprotesnya dengan keras. Seperti dikutip The Washington Post (22 September 2011), Zhang menyatakan: “The wrongdoing by the US side will inevitably undermine bilateral relations as well as exchanges and co-operation in military and security areas.” Dia menambahkan bahwa “China strongly urges the US to be fully aware of the high sensitivity and serious harm of the issue, seriously treat the solemn stance of China, honour its commitment and immediately cancel the wrong decision.”

China telah melihat penjualan senjata di antara mereka menurut enam pandangan. Pertama, penjualan senjata merupakan bentuk intervensi yang dapat mengancam kedaulatan China. Kedua, penjualan senjata mengurangi prospek perdamaian, karena mengurangi niat negosiasi Taipei. Ketiga, penjualan senjata semakin memperkuat gerakan kemerdekaan. Keempat, penjualan senjata tidak akan meningkatkan kepercayaan Taiwan dalam negosiasi dengan China, karena ketika kebijakan serupa diterapkan pada tahun 2001, tidak ada kemajuan signifikan yang dibuat dalam hubungan lintas selat. Kelima, alih-alih memotong penjualan senjata api sesuai janjinya, Amerika Serikat justru mengingkari janji itu dengan menjual pucuk senjata api yang telah mencapai \$50 miliar sejak 1979. Keenam, senjata Amerika Serikat n' tidak akan mempengaruhi keseimbangan kekuasaan antara Taiwan dan China.

D. Taiwan Relations Act (TRA) Sebagai Strategi Deterrens Amerika Serikat

Amerika Serikat menerapkan strategi deterrence kepada China agar tidak menggunakan serangan militer kepada Taiwan. Kepentingan AS dalam kasus ini terbatas pada kepentingan reputasional. AS berniat mencegah (to deter). China menyerang Taiwan untuk menjaga kredibilitasnya dalam usaha menjaga keamanan regional. Strategi ini secara eksplisit tertuang di dalam kerangka perjanjian Taiwan Relations Act. Mantan presiden AS George W. Bush mengatakan bahwa kebijakan AS didasarkan atas prinsip tidak ada penggunaan serangan militer oleh China kepada Taiwan. Lebih lanjut Bush menekankan, “...all issues regarding Taiwan's future must be resolved peacefully and must be agreeable to the people of Taiwan. If China violates these principles and attacks Taiwan, then the United States will respond appropriately in accordance with the Taiwan Relations Act. America will help Taiwan defend itself.” Bahkan di salah satu interview dengan televisi nasional, Bush menyatakan akan melakukan apa saja

untuk melindungi Taiwan.

Perjanjian Taiwan Relations Act (TRA) dimulai pada tanggal 10 April 1979, tiga bulan setelah dibukanya hubungan diplomatik penuh antara AS dan China tanggal 1 Januari 1979. Perjanjian tersebut menandakan bahwa hubungan, selain diplomatik, di antara AS dan Taiwan tidak berakhir, dengan diakuinya hanya ada satu China melalui Shanghai Communiqué pada tanggal 28 Pebruari 1972. Melalui TRA, AS tetap menjalin hubungan perdagangan, kebudayaan dan berbagai hubungan yang tidak resmi lainnya. Di bawah TRA, AS menjalankan kebijakan: (1) Memelihara dan mengembangkan hubungan kultural, perdagangan dan lainnya secara ekstensif dan bersahabat di antara AS dan rakyat Taiwan, (2) Mendeklarasikan perdamaian dan stabilitas di area kepentingan politik, keamanan dan ekonomi AS dan di area yang menjadi perhatian internasional, (3) Memperjelas masa depan Taiwan akan ditentukan oleh cara-cara damai; menganggap bahwa usaha-usaha yang menentukan masa depan Taiwan, selain cara-cara damai, termasuk boikot atau embargo, merupakan ancaman keamanan dan perdamaian bagi negara-negara Pasifik Barat dan menjadi perhatian penting bagi AS, (4) Menyediakan persenjataan defensive untuk Taiwan, (5) Meyakinkan hak untuk melawan segala macam bentuk serangan atau koersi yang akan mengancam keamanan atau sistem ekonomi dan sosial rakyat Taiwan.

Di dalam pasal 3 TRA tertuang poin penting, bahwa AS berhak menjual persenjataan kepada Taiwan untuk maksud pertahanan diri, sesuai jumlah yang dibutuhkan. Itulah yang menjadi landasan AS untuk menjual persenjataan dan perlengkapan militer lainnya kepada Taiwan dalam jumlah yang relatif besar. Pada awal tahun 2010 pemerintahan Obama menyetujui rencana penjualan senjata ke Taiwan sebesar 6,4 milyar dolar AS. Jumlah itu terdiri dari 114 misil Patriot sebesar 2, 81 milyar dolar, 60 helikopter Black Hawk senilai 3,1 milyar dolar dan selebihnya (340 juta dolar) peralatan komunikasi untuk pesawat F-16 pesanan Taiwan. Pada tahun-tahun sebelumnya, penjualan artikel dan servis pertahanan, juga terjadi, dan dalam jumlah yang cukup besar. Di periode tahun 2001-2004, transaksi artikel dan servis pertahanan untuk Taiwan mencapai 3,7 milyar dolar, dan pada periode 2005-2008 senilai 3,9 milyar dolar AS.

E. Strategi Defensif China

Secara eksplisit dalam National Defense Policy tahun 2008, China menyatakan bahwa kebijakan pertahanannya murni defensif. Lebih lanjut China menyebut strategi militernya sebagai pertahanan aktif, yaitu mematuhi prinsip-prinsip operasi defensif, self defense, dan menyerang apabila telah diserang terlebih dahulu oleh musuh. Selain itu, China juga memastikan tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang pertama kali, mengejar strategi nuklir self-defensive dan tidak akan masuk di dalam perlombaan senjata nuklir dengan negara lain.⁴⁴ Secara spesifik berkaitan dengan permasalahan reunifikasi Taiwan, China menyinggung secara eksplisit berlanjutnya penjualan senjata AS kepada Taiwan. China menganggap bahwa kebijakan AS tersebut tidak hanya menciderai tiga Sino- US communiqué, tetapi juga menciderai perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan. Meskipun begitu, China tetap berkomitmen untuk tetap menjunjung tinggi perdamaian dan kerjasama antar negara

Alih-alih akan menggunakan kebijakan koersif, seperti yang kerap dikhawatirkan oleh AS, untuk menangani permasalahan Taiwan, China memilih untuk menggunakan pilihan yang berseberangan. Beijing memilih untuk meningkatkan mutual trust di bidang politik,

menyelenggarakan dialog dan konsultasi, serta mewujudkan kesepakatan pertukaran surat, transportasi dan perdagangan, sebagaimana meningkatnya hubungan ekonomi dan finansial di antara China dan Taiwan. Sekali lagi, dalam China's National Defense tahun 2010, selain menerapkan strategi defensif dan hanya menyerang ketika diserang terlebih dahulu, China menekankan tidak akan mengejar hegemoni, serta tidak akan menggunakan pendekatan militer ekspansif sekarang atau di masa depan.

Meskipun begitu, China tidak akan segan untuk menggunakan serangan militer apabila Taiwan mendeklarasikan kemerdekaannya. Bagi Beijing, Taiwan merupakan bagian dari China, sehingga jika hal itu terjadi akan menjadi pukulan telak bagi persatuan nasional China. Meskipun tetap mengutamakan pendekatan yang damai, namun para pemimpin China tidak bisa berjanji untuk tidak menggunakan serangan militer jika Taiwan bersikukuh ingin merdeka. Hal itu nampak pada pernyataan Deng Xiaoping, "We strive for a peaceful solution to the Taiwan issue, but would never rule out the option of force. We cannot make such a promise. What if the Taiwan regime never negotiates with us, what shall we do? Could it be said that we should then give up national reunification? We must remember this. Our next generation must remember this. This is a strategic consideration".

Strategi deterens yang dilancarkan oleh AS melalui Taiwan Relations Act merupakan faktor utama dalam memahami segitiga hubungan antara AS, China dan Taiwan. Di dalam TRA tercantum secara eksplisit bahwa AS menginginkan "masa depan Taiwan akan ditentukan oleh cara-cara damai; menganggap bahwa usaha-usaha yang menentukan masa depan Taiwan, selain cara-cara damai, termasuk boikot atau embargo, merupakan ancaman keamanan dan perdamaian bagi negara-negara Pasifik Barat dan menjadi perhatian penting bagi AS." Hal ini berarti, pemilihan kebijakan koersif dalam upaya reunifikasi Taiwan oleh China akan memiliki dampak langsung dengan AS. Beijing telah merasakan bagaimana eratnya hubungan AS-Taiwan – yang dikerangkai oleh TRA – sewaktu terjadi ketegangan di selat Taiwan pada tahun 1995-1996. Dikirimnya dua kapal induk AS ke Selat Taiwan membuktikan bahwa TRA bukanlah perjanjian main-main. Hal tersebut juga membuktikan bahwa komitmen AS untuk melindungi Taiwan dari tindakan unilateral China untuk reunifikasi sangatlah kuat. Komitmen ini masih terjaga untuk mempertahankan kredibilitas AS dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Timur. Sebagai "penjamin" (guarantor) keamanan dan perimbangan kekuatan Asia Timur, Amerika Serikat tetap mempertahankan aliansi dan kehadiran militernya di kawasan ini.

F. Dinamika Konflik di Selat Taiwan

Kisah konflik penyeberangan Jalan Taiwan dimulai ketika Front Komunis mengalahkan Front Nasionalis dan memimpin China pada tahun 1949. Front Nasionalis yang dikalahkan akhirnya dapat menduduki Taiwan dan menguasai tiga kelompok dari pulau yang jauh dari pantai. Simern, Mazu, Dagen. Front Komunis mencoba menyerang Taiwan karena jika Front Komunis dapat menaklukkan Taiwan, Revolusi China akan selesai (Monte R. Bullard: hal.144). Taiwan ingin berdiri sendiri. Perbedaan kepentingan kedua pihak inilah yang menyebabkan konflik ini. Seiring berjalannya waktu pada tahun , konflik lintas selat ini pun semakin berkembang.

Dalam perkembangannya, konflik penyeberangan Selat Taiwan ini mengalami beberapa kali krisis. Krisis penyeberangan Selat Taiwan yang pertama terjadi pada tahun 1954- 1955

(Monte R. Bullard, 2004: 147)1, krisis penyebrangan Selat Taiwan kedua terjadi pada tahun 1958(Monte R. Bullard: hal 152), krisis penyebrangan Selat Taiwan ketiga terjadi pada tahun 1962(Monte R. Bullard, 2004: 155), dan periode tenang terjadi pada tahun 1962-1994(Monte R. Bullard, 2004: 155).

Krisis Selat Taiwan Pertama (juga disebut Krisis Selat Taiwan 1954-1955, Krisis Selat Taiwan 1955) yaitu konflik bersenjata singkat yang terjadi selang Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan pemerintahan Republik Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok menguasai Kepulauan Yijiangshan, memaksa Republik Tiongkok bagi meninggalkan Kepulauan Tachen. Amerika Serikat dan Republik Tiongkok bersama mengevakuasi personel militer dan masyarakat Republik Tiongkok dari Selat Tachen ke Taiwan. Meskipun Kepulauan Tachen bertukar kepemilikan selama krisis, media Amerika lebih terfokus menyiarkan tempat terjadinya pertempuran artileri di Kepulauan Matsu dan Quemoy.

Krisis Selat Taiwan Kedua, juga disebut Krisis Selat Taiwan 1958, merupakan konflik yang terjadi selang Republik Rakyat China (RRC)dengan Republik China dimana RRC menyerang kepulauan Matsu dan Quemoy di Selat Taiwan untuk merebut kepulauan tersebut dari Republik China. Krisis ini merupakan lanjutan dari Krisis Selat Taiwan Pertama.

Krisis Selat Taiwan Ketiga, juga disebut Krisis Selat Taiwan 1995-1996 atau Krisis Selat Taiwan 1996, adalah akhir suatu peristiwa dari uji coba misil yang dilancarkan oleh Republik Rakyat Tiongkok di perairan sekitar Taiwan termasuk Selat Taiwan dari tanggal 21 Juli 1995 hingga 23 Maret 1996. Rentetan misil pertama yang ditembakkan selang pertengahan hingga kesudahan 1995 dituduh merupakan sinyal terhadap pemerintahan Republik Tiongkok dibawah Lee Teng-hui yang diasumsikan menggerakkan kebijakan luar negeri Republik China jauh dari Kebijakan Satu China. Tahun 1996, situasi politik di Taiwan sedang panas menjelang pemilihan umum presiden. Salah satu bakal presiden, Lee Teng-hui, diyakini China berusaha mendekati Taiwan menuju kemerdekaan resmi. Presiden China saat itu, Jiang Zemin, tak tinggal diam. Ia memerintahkan tes roket dan perang di Selat Taiwan demi mengintimidasi pemilih Taiwan agar tak mendukung Lee Teng-hui. Strategi tersebut malah menjadi bumerang dan memicu konflik, hingga mendorong pasukan Amerika Serikat ke Selat Taiwan untuk menakut-nakuti China. Lee justru menang telak dalam pemilu

Hubungan China dan Taiwan terus naik turun, hingga pada 2005 ketika China menerbitkan undang-undang, berisikan ancaman aksi militer jika Taiwan berani bergerak menuju kemerdekaan resmi. Reuters bahkan pernah melaporkan bahwa ribuan rudal China saat ini juga sudah mengarah ke Taiwan, siap ditembakkan kapanpun.

KESIMPULAN

Adanya Rivalitas antara Amerika Serikat dan China akan terus meningkat apabila kedua negara tetap menekankan pada tensi kekuatan militer mereka. Upaya China untuk meunifikasi Taiwan akan terus dilakukan meskipun perlu menggunakan kekerasan. Namun, Amerika Serikat tidak akan tinggal diam dengan tindakan China yang terus menekan Taiwan untuk bersatu dalam kedaulatannya. Kedepan, AS kemungkinan akan terus mengirimkan senjata ke Taiwan tanpa mempedulikan keberatan dari China. AS sepertinya mencoba mempertahankan status quo sambil mengeruk keuntungan dari persoalan yang sedang mengemuka di Selat Taiwan. Di satu sisi, AS mendukung perkembangan politik Taiwan seraya meraup uang dari hasil penjualan senjata untuk menangkai kebangkitan pesat China. Di sisi lain, AS ingin memelihara

perdamaian di Asia dengan menghindari perang aktual di Selat Taiwan. Sejauh ini, AS berhasil menyeimbangkan dua tujuan itu. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, konflik yang berujung perang besar di Asia bisa saja terjadi. Pandangan Henry Liu yang dikemukakannya sebelas tahun lalu (2003, 1) tampak masih relevan menggambarkan dampak disharmoni dalam relasi harmonis kedua great powers itu terhadap masa depan perdamaian dunia

Pengambilan strategi defensif China, berdasarkan offense-defense balance, China lebih memilih untuk mempertahankan status quo daripada maju, menghancurkan dan melakukan reunifikasi secara paksa dengan Taiwan. Pengalokasian dana untuk bertahan jauh lebih murah, daripada untuk menyerang. Akan tetapi teori offense-defense merupakan teori yang dinamis. Meskipun termasuk dalam varian realisme defensif, yang berasumsi bahwa negara di dalam sistem internasional selalu mencari keamanan (security maximizer), akan tetapi jika menyerang menguntungkan, maka negara akan lebih memilih untuk menyerang daripada bertahan, begitu juga dengan China. Menyerang akan lebih menguntungkan bagi China daripada bertahan jika kapabilitas militernya sama atau melampaui kapabilitas militer AS, sehingga kemungkinan untuk menang dalam peperangan semakin besar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Keamanan Selat Taiwan dapat terjaga apabila Amerika Serikat dan China dapat menahan diri untuk memulai konflik. Kerjasama Amerika Serikat dan Taiwan yang berdasarkan TRA merupakan tindakan deteren dari Amerika Serikat kepada China untuk menahan China agar tidak melakukan tindakan agresif yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori (2011). "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung, Alfabeta.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). "Memahami Penelitian Kualitatif". Jakarta: Rineka Cipta
Brooking Institution Press.
- China's National Defense in 2008, Information Office of the State Council of the People's Republic of China January 2009, Beijing.
- China's National Defense in 2010, Information Office of the State Council of the People's Republic of China, Mar. 31, 2011.
- Hu, Weizhang, 2000. From Nixon to Clinton: The Changes of the U.S.
- Kenneth N. Waltz. (1979). "Theory of International Politics". New York: Random House
- Mann, Jim, 1999. About Face. New York: Alfred A. Knopf.
- Moleong, Lexy J. (2015). "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya
- One-China Policy. Taipei: Taiwan Commercial Publisher.
- Robert Jackson & George Sorenson. (2013). "Pengantar Studi Hubungan Internasional Edisi

Kelima". Jakarta. Pustaka Pelajar

Suettinger, Robert, 2003. *Beyond Tiananmen*. Washington D.C.:

Sugiyono. (2006). "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D." Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2007). "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D." Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2010). "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D." Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2012). "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D." Bandung: Alfabeta

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). "Metode Penelitian Pendidikan." Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Syabuddin. (2019). Eksistensi Kepentingan Global Amerika Serikat dalam Konflik Tiongkok-Taiwan. Halaman 76